

Heru Budi-Pimpinan DPRD DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2023 Senilai Rp82,5 Triliun

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 pada Selasa (8/11).

Penandatanganan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna legislatif Jakarta di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa. Dari pantauan di lapangan, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi membuka rapat beragenda penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD 2023 senilai Rp 82.543.539.889.450 (Rp 82,5 triliun) itu.

Prasetyo menyampaikan, dasar penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD 2023 tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Prasetyo lalu meminta pembawa acara

mengatur jalannya penandatanganan MoU tersebut.

"Berikutnya, kita saksikan bersama penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang pelaksanaannya dipandu oleh pembawa acara," ucap politisi PDI-P itu di Ruang Rapat Paripurna.

Pembawa acara kemudian mempersilakan para pimpinan rapat dan Heru untuk turun ke area penandatanganan MoU. Tepatnya di sisi depan Ruang Rapat Paripurna, mereka secara bergantian menekan beberapa berkas MoU KUA-PPAS APBD 2023 yang terletak di sebuah meja.

Wakil Ketua DPRD DKI, Rani Mauliani merupakan pimpinan pertama yang membubuhkan tanda tangan, diikuti oleh Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Menyusul, Prasetyo bersama Heru menandatangani MoU KUA-PPAS tersebut. Usai tanda tangan, Heru dan para pimpinan DPRD DKI berfoto bersama sebelum kembali ke kursi masing-masing. ● yan

DKI Panggil Kontraktor yang Tak Tutup Lubang Trotoar Kebayoran Baru

JAKARTA (IM) - Lubang-lubang masih menganga berjejer di trotoar kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kondisi itu berbahaya. Karenanya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta memanggil kontraktor agar cepat menutup lubang-lubang itu.

"Kita sudah memanggil kontraktornya, kita mintakan jadwal penyelesaiannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Bernhard Hutajulu, Selasa (8/11).

Lubang-lubang itu merupakan lubang saluran air untuk mempermudah perawatan (maintenance) drainase yang dikelola Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Pembangunan saluran air itu sudah selesai. Pembuatan penutup lubang saluran air dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda, tapi sampai saat ini kontraktor itu belum menyelesaikan pekerjaannya.

"Segera ditutup. Dari

kontraktor ada masalah di internal mereka. Kita sudah push untuk penutupan lubang itu karena membahayakan masyarakat," kata Bernhard.

Sepekan sudah sejak diberitakan, lubang yang menganga di trotoar Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini, belum juga ditutup sampai sekarang. Bahkan, ada lubang yang berada di jalur tunanetra.

Pantauan di lokasi, kemarin, lubang di trotoar ada di Jl Trunojoyo, Jl Adityawarman, juga di Jl Sultan Hasanudin. Terdapat lubang-lubang di guiding block untuk penyandang tunanetra di Jl Adityawarman dan Jl Sultan Hasanudin. Namun di jalur pedestrian tunanetra, ada juga lubang menganga!

Jarak antar-lubang tampak tidak terlalu jauh. Sekilas, ini mirip jalur halang rintang. Ada pula lubang yang berada di luar guiding block kuning itu. Terdapat kurang lebih 10 lubang yang tidak tertutup di sepanjang trotoar. ● yan

Antisipasi Rob, Pemkot Jakut Siaga dan Tutup Tanggul Laut yang Bocor

JAKARTA (IM) - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim meminta jajarannya bersiaga menghadapi banjir pesisir utara rob.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta baru saja mengeluarkan peringatan dini potensi rob di sejumlah wilayah Jakarta Utara pada 8-14 November 2022.

"Pengurus RT/RW dan stakeholder kami kerahkan untuk bersinergi, bersiap siaga terjadinya rob

Ali menyebutkan, petugas gabungan dari unsur tiga pilar, serta BPBD DKI juga telah disiagakan di sejumlah titik genangan di pesisir Jakarta Utara.

Selain itu, Pemkot Jakarta Utara telah berupaya menutup tanggul laut yang bocor dan mempersiapkan karung pasir untuk menahan rob tidak masuk ke daratan seperti di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan. "Termasuk menyiapkan sejumlah mesin pompa untuk percepatan mengembalikan genangan ke laut saat rob terpantau surut," ujar Ali.

"Masyarakat sudah kami sosialisasikan untuk waspada, begitu pun kesiapsiagaan

sinergitas petugas, sarana dan prasarana, termasuk posko sudah kami siapkan," tutur dia.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta merilis wilayah-wilayah di Jakarta Utara yang berpotensi dilanda banjir pesisir atau rob. Dalam keterangan terbaru BPBD DKI, ada sembilan wilayah di Jakarta Utara yang berpotensi dilanda rob pada 8-14 November 2022.

"Berdasarkan aktivitas pasang air laut yang mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah Jakarta Utara yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir (rob) pada pukul 09.00-13.00 WIB," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya, Senin (7/11) petang.

Kesembilan wilayah tersebut yakni Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru.

BPBD DKI meminta agar warga yang tinggal di daerah tersebut untuk waspada. "Bila dalam keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112," kata Isnawa. ● yan

4 | Metropolis

FOTO:ANT



PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING

Foto udara operator alat berat merobohkan rumah saat pembebasan lahan proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing seksi 4 di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/11). PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP Tollways) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mencatat progres pembebasan lahan untuk seksi 4 sepanjang 7,28 km telah mencapai 100 persen dan ditargetkan pembangunannya selesai pada akhir tahun 2022.

Penghentian Anggaran Rumah DP Rp0 di DKI Dipertanyakan

Program DP Rpo merupakan program baik yang dijalankan semasa Anies menjabat Gubernur DKI. Program DP Rpo itu sangat bermanfaat bagi warga. Meski tidak memenuhi target jumlah pembangunan unit dari janji awal, tapi karena program ini memang bagus, terusin dong, kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri mempertanyakan alasan Badan

Anggaran (Banggar) yang tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah DP Rp0 warisan mantan gubernur Anies Baswedan. Padahal, menurut dia, program DP Rp0 merupakan program baik yang dijalankan semasa Anies menjabat Gubernur DKI.

"Kalau bagus ya terusin dong, kalau menurut saya jangan sesuatu dilihat dari sisi politik. Kalau bermanfaat untuk warga kenapa tidak dilanjutkan?" tanya Hasan kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/11).

Dia menjelaskan, program

DP Rp0 bermanfaat bagi warga. Meski tidak memenuhi target jumlah pembangunan unit dari janji awal, dia meminta pengertian banyak pihak mengingat adanya pandemi sejak 2020-2021.

"Karena dua tahun kan pandemi, pembangunan Jakarta 2020-2021 nggak ada sama sekali karena anggaran semua dialihkan ke Covid-19," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko mengaku Pemprov tidak lagi mengusulkan program DP Rp 0 dalam APBD 2023. Namun demikian, dia memastikan pembiayaan tetap bisa dilakukan dengan pihak ketiga.

"Dibiayai oleh pemembang, bisa oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta," kata Sarjoko, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, APBD 2023 akan berfokus pada dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan

Rumah (FPPR) yang merupakan investasi nonpermanen. Alokasi itu, dinilai sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik DP Rp0 melalui skema perbankan.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar, dan sudah tersalurkan sebanyak Rp254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Rp0," tuturnya.

Khusus dana tersisa yang ada di kas unit pengelola dana perumahan (UPDP) Dinas PRKP DKI, kata dia, senilai Rp295,2 miliar. Dana tersebut, kata Sarjoko, akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa sebanyak 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit.

"Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp176 miliar," ucapnya. ● yan

Pemerintah Berniat Kenakan Pajak Lingkungan Kendaraan Beremisi Tinggi

JAKARTA (IM) - Direktur Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Luckmi Purwandari mengatakan, saat ini pemerintah sedang menggodok aturan guna mengenakan pajak lingkungan kepada pemilik kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi.

Luckmi mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendorong warga menggunakan kendaraan berteknologi yang lebih baik sehingga lebih ramah lingkungan. Pengenaan pajak lingkungan juga untuk membantu kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM dan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Kebijakan ini secara tidak langsung telah berkontribusi pada perbaikan kualitas udara karena masyarakat didorong menggunakan bahan bakar beroktan tinggi yang emisinya lebih rendah. "Tidak hanya kebijakan kenaikan harga BBM tapi juga dari kendaraan yang bisa memenuhi baku mutu pajaknya bisa lebih ringan. Dia tidak dikenakan pemberatan pajak lingkungan.

Sementara, yang tidak bisa memenuhi baku mutu akan

dikenakan pajak lingkungan. Ini lagi proses regulasinya," ujar Luckmi dalam dialog publik bertajuk 'Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta', Selasa (8/11).

Pemerintah juga telah memperketat standar baku mutu dari emisi kendaraan melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

Berdasarkan beleid tersebut, kendaraan bermotor yang diproduksi pada setelah 2017 harus memiliki standar emisi Euro 4. "Oleh karena itu, kendaraan yang beroperasi sedang diperketat. Ini sedang diharmonisasi dengan Permen LH 5/2006. Baku mutunya itu sedang diperketat, regulasinya lagi dibicarakan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengungkapkan pemerintah memang harus memperketat penggunaan bahan bakar bersubsidi yang masih beroktan lebih rendah. Selain agar subsidi yang

dikeluarkan pemerintah lebih tepat sasaran, hal ini juga demi meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan bahan bakar non subsidi yang lebih ramah lingkungan. Sehingga, pencemaran udara pun dapat dikurangi. "Ini kita dorong ya utamanya harus pakai jenis bahan bakar yang baik. Ini upaya untuk menekan emisi. Angkutan umum belum bisa mawadahi kepentingan seluruh masyarakat sehingga bahan bakarnya yang harus ditingkatkan. Kadar oktannya yang berkontribusi. Plan keadilan ekologis di Jakarta akan terwujud begitu juga dengan keadilan ekonomi," tuturnya.

Ia pun sependapat dengan KLHK yang menginginkan adanya disinsentif bagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi. Seperti halnya Pemprov DKI sudah mengenakan tarif parkir tinggi bagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi.

"Begitu juga yang memakai mobil, karena dia sudah mencemari lingkungan ya harus pakai bahan bakar yang mahal agar bisa mengurangi pencemaran. Di DKI, dia belum lolos uji emisi otomatis tarif parkir tinggi," tandasnya. ● yan

FOTO:ANT



HARGA SET TOP BOX NAIK Tajam

Warga memilih perangkat set top box (STB) di sebuah toko elektronik di Pasar Induk Rau Kota Serang, Banten, Selasa (8/11). Harga perangkat penangkap siaran tv digital tersebut naik tajam dari semula Rp200 ribu menjadi Rp400 ribu per unit akibat naiknya permintaan.

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi PT. DWA KARYA BULUNGAN ("Perseroan") dengan ini mengumumkan dan memberitahukan kepada semua kreditor Perseroan bahwa berdasarkan keputusan para Pemegang Saham Perseroan tanggal 8 November 2022, sebagaimana telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. DWA KARYA BULUNGAN tanggal 8 November 2022, No. 04, dibuat dihadapan DELNY TEOBERTO, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, para pemegang saham Perseroan antara lain telah memutuskan untuk menyetujui penunahan atau pengurangan modal Perseroan dengan cara menarik kembali sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan yaitu sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) saham, sehingga setelah efektif, struktur modal Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPT, dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kreditor dapat mengajukan keberatan atas penunahan atau pengurangan modal tersebut secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan dengan alamat Graha Mas Fatmawati Jl. RS Farmawati Blok A 19, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 09 November 2022
Direksi Perseroan

PAM Jaya Jual Air Bersih di Pesisir Muara Angke, Per 20 Liter Rp400

JAKARTA (IM) - Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya meresmikan tujuh kios air di wilayah pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, pada Selasa (8/11).

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin berujar, per kios air mampu melayani hingga 200 kepala keluarga (KK).

Dengan demikian, terdapat 1.400 keluarga yang terlayani dari tujuh kios tersebut.

"Tujuh Kios Air yang kami resmikan hari ini dapat menyuplai air sekitar 84.000 liter setiap hari," ucap Arief di RW 22, Muara Angke, Selasa.

Ia menegaskan, harga 20 liter air bersih dari kios itu Rp400, jika diambil secara langsung di lokasi. Kemudian, jika diantarkan, sebanyak 20 liter air bersih

dari kios itu dipatok harga Rp1.200.

Arief menyebut, PAM Jaya bakal mengganti gerobak dorong yang biasa dipakai untuk mengantarkan air bersih ke pelanggan menjadi gerobak motor. "Sehingga tidak ada lagi di Jakarta yang tarik-tarik gerobak," kata Arief.

Dalam kesempatan itu, ia menambahkan bahwa proses instalasi tujuh kios air itu merupakan tahap awal dari pemenuhan 100 persen air bersih di Ibu Kota yang ditargetkan rampung pada 2030.

"Ini sebenarnya bagian dari staging kami di PAM Jaya, untuk percepatan (pemenuhan air bersih bagi warga). Memang kami hadir dengan kios air dulu," urai Arief. ● yan

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30").

Berikutan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga pada tanggal ditandatangani Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30.
2. Pada tanggal 9 November 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 sejak tanggal 9 November 2022.
3. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 9 November 2022
Manajer Investasi
SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 30
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan